

## Pelanggaran Prinsip Kerja Sama dalam Debat Pemilihan Umum Calon Presiden 2019

Sofiana<sup>1</sup>, Hermaliza<sup>2</sup>  
Universitas Islam Riau, Indonesia<sup>1,2</sup>  
*sofiana.falla13@gmail.com*<sup>1</sup>

### Info Artikel:

Diterima September 2020  
Disetujui Januari 2021  
Dipublikasikan Februari 2021

### Alamat:

Jalan Kaharudin Nasution No.  
113 Simpang Tiga, Pekanbaru  
Riau 24248  
e-mail: jlelc@journal.uir.ac.id

### Sitasi Artikel:

Sofinana & Hermaliza (2021)  
Pelanggaran Prinsip Kerja Sama  
dalam Debat Pemilihan Umum  
Calon Presiden 2019. *J-  
LEC: Journal of Language  
Education, Linguistics, and  
Culture*, 1(1), 95-104.

### Abstract

The purpose of this study is 1) to determine violations of the principle of cooperation in the 2019 presidential election debate. This research is classified as a qualitative descriptive study. Data collection in this study is related to the following: 1) documentation techniques, 2) hermeneutic techniques. The data source in this study is the overall speech of the speeches between the debate moderator and presidential and vice presidential candidate pairs in the 2019 presidential candidate general election debate, while the data in this study are all violating speeches in the five debate sessions on the 2019 presidential candidate general election. In research, namely how the violation of the principle of cooperation in the 2019 presidential election debates, the results of this are 1) violations of the maximal quantity in the 2019 presidential candidate general election debates violated totaled 14 speeches, 2) violations of the quality maxims in the presidential election debates. There were 25 speeches violated in 2019, 3) Maximum relevance violations in the 2019 presidential election debates violated totaled 26 speeches, 4) violations of maximal implementation or method in the 2019 presidential candidate general election debates violated totaled 19 utterances.

Keywords: violations, the principle of cooperation

### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui pelanggaran prinsip kerjasama dalam debat pemilihan umum calon presiden 2019. Penelitian ini tergolong penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut: 1) teknik dokumentasi, 2) teknik hermeneutik. Sumber data dalam penelitian ini yaitu tuturan keseluruhan dari tuturan antara moderator debat dan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam debat pemilihan umum calon presiden 2019 sedangkan data dalam penelitian ini adalah seluruh tuturan yang melanggar dalam lima sesi debat pemilihan umum calon presiden 2019. Sesuai dengan masalah dalam penelitian yaitu bagaimana pelanggaran prinsip kerja sama dalam debat pemilihan umum calon presiden 2019, maka hasil dari ini yaitu 1) pelanggaran maksim kuantitas dalam debat pemilihan umum calon presiden 2019 yang dilanggar berjumlah 14 tuturan, 2) pelanggaran maksim kualitas dalam debat pemilihan umum calon presiden 2019 yang dilanggar berjumlah 25 tuturan, 3) Pelanggaran Maksim relevansi dalam debat pemilihan umum calon presiden 2019 yang dilanggar berjumlah 26 tuturan, 4) pelanggaran maksim pelaksanaan atau cara dalam debat pemilihan umum calon presiden 2019 yang dilanggar berjumlah 19 tuturan.

*Kata Kunci: pelanggaran, prinsip kerja sama*

## Pendahuluan

Bahasa merupakan media utama atau alat komunikasi yang dipakai dalam interaksi antar individu untuk menyampaikan maksud dan tujuannya kepada orang lain (Zulfadhli et al., 2017). Bahasa sangat berperan penting dalam pendidikan seseorang (Asnawi, 2014). Menurut Chaer (1994:32) menyatakan bahwa bahasa adalah system lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh para anggota masyarakat untuk bekerja sama dan berkomunikasi. Dalam kegiatan berdiskusi atau debat seseorang melibatkan penggunaan bahasa, dengan adanya bahasa sebagai alat komunikasi, manusia dapat menyampaikan ide atau gagasannya kepada orang lain.

Ilmu bahasa mempunyai berbagai cabang, salah satu diantaranya adalah pragmatik. Pragmatik adalah ilmu bahasa yang mempelajari tentang situasi dalam penggunaan bahasa dan latar belakang pemahaman penutur dan mitra tutur sehingga lawan tutur tersebut mengetahui dari sipenutur. Menurut Tarigan (2009:3) mendefinisikan pragmatik adalah menelaah ucapan-ucapan khusus dalam situasi-situasi khusus dan memusatkan perhatian pada aneka ragam cara yang merupakan wadah aneka konteks sosial. Pragmatik sebagai kajian makna secara konteks sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Ada salah satu kajian pragmatik yang menarik untuk dianalisis. Kajian tersebut adalah mengenai prinsip kerja sama. Prinsip kerja sama di sini adalah kerja sama antara penutur dengan mitra tutur sehingga apa yang disampaikan dapat dipahami dengan baik. Wijana (1996:45) menyebutkan bahwa prinsip kerja sama sama halnya dengan proses komunikasi yang wajar dilaksanakan oleh masyarakat sehingga tujuan pembicaraan atau percakapan mampu dicapai. Seorang penutur pasti memiliki informasi yang ingin disampaikan atau diperoleh dalam sebuah percakapan, oleh karena itu prinsip kerja sama sangat diperlukan dalam proses percakapan.

Analisis yang akan dilaksanakan mengarah pada pelanggaran prinsip kerja sama yang meliputi maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim relevansi, dan maksim cara. Pemilihan pelanggaran prinsip kerja sama ini dikarenakan masyarakat Indonesia banyak yang sering berkomunikasi dengan mengatakan sesuatu tidak secara langsung atau sering dikenal dengan basa-basi. Komunikasi semacam ini banyak dipengaruhi oleh latar belakang sosial budaya, kesopanan, toleransi, dan bahkan untuk mempererat hubungan kekeluargaan antar penutur. Hal lain yang teridentifikasi adalah adanya pengalihan topik dari salah satu pihak penutur untuk mendapatkan atau memberikan informasi di luar yang diinginkan oleh lawan tutur.

Kegiatan berbahasa harus ada prinsip kerja sama. Rahardi (2005:52) prinsip kerja sama adalah komunikasi yang dilakukan oleh penutur dan lawan tutur yang mengartikulasikan sesuatu kepada penutur untuk memahami apa yang ingin disampaikan sehingga proses komunikasi berjalan dengan lancar dan adanya kerjasama. Grice (dalam Nadar, 2013:24) merumuskan bahwa prinsip kerja sama berbunyi sebagai berikut: "Berikanlah kontribusi anda dalam percakapan sesuai dengan kebutuhan, pada tingkat dimana percakapan tersebut berlangsung, sesuai dengan maksud dan tujuan dimana anda terlibat". Maksudnya adalah ketika kita melaksanakan sebuah percakapan, kita perlu mempertimbangkan kebutuhan percakapan atau jawaban yang dibutuhkan, kemudian kita juga harus memperhatikan dimana kita melaksanakan percakapan, serta maksud dan tujuan percakapan tersebut sehingga apa yang dibicarakan tidak menyebar ke hal lain yang tidak diperlukan.

Debat merupakan salah satu peristiwa komunikasi. Menurut Dipodjojo dalam Imron Wafdurrahman (1984:45) debat adalah suatu proses komunikasi lisan, yang dinyatakan dengan bahasa untuk mempertahankan pendapat. Debat juga bertujuan untuk mencapai kemenangan dalam suatu hal, sebagaimana yang dijelaskan oleh Hendrikus dalam Imron Wafdurrahman (1991:120) debat adalah saling adu argumentasi antar pribadi atau antar kelompok manusia dengan tujuan mencapai kemenangan untuk satu pihak. Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa debat merupakan suatu kegiatan mengadu argumentasi antara dua pihak atau lebih yang bersifat perorangan ataupun kelompok didalam mendiskusikan dan memutuskan masalah dan perbedaan serta mencapai suatu kemenangan.

Dipilihnya debat pemilihan umum calon presiden 2019 sebagai objek penelitian ini karena dalam debat pemilihan umum calon presiden 2019 ditemukan pelanggaran-pelanggaran

prinsip kerja sama percakapan. Misalnya, pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 maupun 02 sering kali tidak sesuai jawaban atas pertanyaan yang diberikan oleh moderator debat. Alasan penulis memilih prinsip kerjasama untuk diteliti karena prinsip kerja sama mempunyai peran yang sangat penting dalam kegiatan berkomunikasi terutama dalam debat. Hal ini disebabkan prinsip kerja sama dapat menyebabkan interaksi orang satu dan yang lainnya berjalan baik atau sebaliknya. Apabila prinsip kerja sama dipahami secara benar, maka akan menimbulkan penafsiran yang benar terhadap maksud pembicara sehingga alur pembicaraan dapat diterima dengan baik dan utuh.

Alasan penulis meneliti pelanggaran prinsip kerjasama dalam objek penelitian karena penulis tertarik dalam debat pemilihan umum calon presiden 2019 yang berbeda dari pemilihan sebelumnya, yang menuai kontroversi antara kedua belah kubu yang menjadi perbincangan pada saat akan dilaksanakan pemilihan umum calon presiden 2019 yaitu pada media massa dan masyarakat. Selain itu, penelitian tentang pelanggaran prinsip kerjasama dalam debat pemilihan umum calon presiden 2019 baru pertama kali diteliti di Universitas Islam Riau. Teori dalam penelitian ini yaitu: Grice dalam Wijana 1996:46) dan Rahardi (2005:53) yang terbagi atas empat maksim yaitu: (1) maksim kuantitas, (2) maksim kualitas, (3) maksim relevansi, dan (4) maksim pelaksanaan/cara. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: (1) bagaimana pelanggaran prinsip kerjasama dalam debat pemilihan umum calon presiden 2019? Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu: (1) untuk mengetahui pelanggaran prinsip kerjasama dalam debat pemilihan umum calon presiden 2019. Penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis. Manfaat secara teoretis dalam penelitian ini dapat menjadi landasan teori bagi peneliti berikutnya yang berkaitan tentang pelanggaran prinsip kerjasama. Adapun manfaat praktis dari penelitian ini yaitu dapat memperluas kajian dalam lingkungan pragmatik bagi para pembaca khususnya tentang pelanggaran prinsip kerjasama.

### Metodologi

Penelitian yang berjudul “Pelanggaran Prinsip Kerjasama dalam Debat Pemilihan Umum Calon Presiden 2019” menggunakan metode *content analysis* (analisis isi). Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian perpustakaan atau *library Research* dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah keseluruhan dari tuturan antara moderator debat dan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam “Debat pemilihan umum calon presiden 2019” yang ditayangkan pada tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan 13 April 2019. Sumber data debat ini diunduh di *youtube* pada tanggal 06 Desember 2019. Sumber data debat diunduh di *youtube* pada tanggal 06 Desember 2019. Data penelitian ini adalah seluruh tuturan yang melanggar dalam lima sesi debat pemilihan umum calon presiden 2019 di *youtube*. Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini berkaitan dengan instrument yang digunakan penulis untuk mendapatkan data yang diinginkan. Penulis menggunakan tiga teknik untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, yaitu: (1) teknik dokumentasi, (2) teknik hermeneutik.

### Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian yang telah dilakukan dalam analisis pelanggaran prinsip kerjasama dalam debat pemilihan umum calon presiden 2019, dalam menentukan pelanggaran prinsip kerjasama dalam debat pemilihan umum calon presiden 2019 Grice dalam Wijana (1996:46) dan Rahardi (2005:53) yaitu:

#### 1) Pelanggaran Maksim Kuantitas

Maksim kuantitas menuntut setiap peserta pembicaraan memberikan kontribusi yang secukupnya atau sesuai dengan yang diperlukan oleh lawan bicaranya.

Konteks : SU sedang memberikan tambahan jawaban PS atas pertanyaan yang diajukan oleh moderator. Adapun konteks pertanyaan berkaitan dengan Indonesia adalah negara yang sangat beragam dari sisi agama, etnis, golongan, dan pandangan

- politik namun dalam kenyataan masih terjadi diskriminasi dan persekusi. Dari sisi HAM, apa strategi anda untuk mengatasi masalah-masalah ini.
- Pertanyaan : Pertanyaan pertama, Indonesia adalah negara yang sangat beragam dari sisi agama, etnis, golongan, dan pandangan politik namun dalam kenyataan masih terjadi diskriminasi dan persekusi. Dari sisi HAM, apa strategi anda untuk mengatasi masalah-masalah ini? waktunya adalah 2 menit dimulai dari perkataan pertama silakan.
- Jawaban SU : *Dalam kunjungan ke 1000 titik lokasi, bertemu masyarakat. Saya menemukan hal-hal yang sangat membuat kita miris, bahwa ada kisah Pak Najib, seorang nelayan di pantai Pasir Putih Cilamaya di Karawang. Beliau mengambil pasir untuk menanam mangrove di hutan bakau. Beliau dipersekusi, dikriminalisasi. Banyak persekusi dan kriminalisasi. Ini tidak terpantau dan hanya kita lihat yang besar-besar saja yang naik. Sementara kasus yang berdampak ke pada masyarakat orang-orang kecil, wong cilik tidak ditangani dengan baik. Di bawah Prabowo Sandi, hukum harus ditegakkan untuk rakyat kecil, kita harus menghadirkan kesejahteraan kepada mereka. Jangan hukum ini di pakai untuk memukul lawan tapi melindungi kawan. Kita pastikan hukum ini tegak lurus, supremasi HAM harus kita pastikan hadir di Indonesia. Tim Prabowo-Sandi, HAM akan kita tegakkan, dan itu harga mati buat kita, adil makmur bersama Prabowo Sandi. (6) (Debat Pertama)*

Data (6) tersebut menunjukkan terjadinya pelanggaran maksim kuantitas, bahwa jawaban dari SU tersebut mengandung informasi yang melebihi informasi yang dibutuhkan. SU dalam debat tersebut memberikan informasi lebih dari yang dibutuhkan oleh mitra tuturnya, terlihat pada tuturan "*Dalam kunjungan ke 1000 titik lokasi, bertemu masyarakat. Saya menemukan hal-hal yang sangat membuat kita miris, bahwa ada kisah Pak Najib, seorang nelayan di pantai Pasir Putih Cilamaya di Karawang. Beliau mengambil pasir untuk menanam mangrove di hutan bakau. Beliau dipersekusi, diskriminalisasi. Banyak persekusi dan kriminalisasi. Ini tidak terpantau dan hanya kita lihat yang besar-besar saja yang naik. Sementara kasus yang berdampak ke pada masyarakat orang-orang kecil, wong cilik tidak ditangani dengan baik*". Kalimat tersebut tidak perlu dikatakan karena banyak memberikan argumen mengenai masyarakat yang dipersekusi dan diskriminasi, serta penguatan ini juga memiliki alasan untuk memperkuat jawaban yang diberikan untuk memperoleh pembenaran dan pendengar atau peserta debat lainnya diluar penanya. Seharusnya SU cukup menjawab "*Di bawah Prabowo Sandi, hukum harus ditegakkan untuk rakyat kecil, kita harus menghadirkan kesejahteraan kepada mereka. Jangan hukum ini di pakai untuk memukul lawan tapi melindungi kawan. Kita pastikan hukum ini tegak lurus, supremasi HAM harus kita pastikan hadir di Indonesia. Tim Prabowo-Sandi, HAM akan kita tegakkan, dan itu harga mati buat kita, adil makmur bersama Prabowo Sandi*". Karena pertanyaan berkaitan dengan Indonesia adalah negara yang sangat beragam dari sisi agama, etnis, golongan, dan pandangan politik namun dalam kenyataan masih terjadi diskriminasi dan persekusi. Dari sisi HAM, apa strategi anda untuk mengatasi masalah-masalah ini.

- Konteks : MA sedang menjawab pertanyaan yang diajukan oleh moderator. Adapun konteks pertanyaan berkaitan dengan strategi agar pemberantasan terorisme bisa benar-benar di jalankan, tanpa ada persepsi dari masyarakat tentang terjadinya pelanggaran HAM harap jawab dapat merujuk pada kasus-kasus yang konkrit agar dapat secara jelas menggambarkan permasalahan yang dihadapi.
- Pertanyaan : Pemberantasan terhadap terorisme sering kali berbenturan dengan isu hak asasi manusia. Bagaimana strategi anda agar pemberantasan terorisme bisa benar-benar di jalankan, tanpa ada persepsi dari masyarakat tentang terjadinya pelanggaran HAM harap jawab dapat merujuk pada kasus-kasus yang

konkrit agar dapat secara jelas menggambarkan permasalahan yang dihadapi. Silahkan dijawab waktunya 2 menit dimulai saat anda berbicara.

Jawaban MA : *Terorisme adalah merupakan akan kejahatan oleh karena itu terorisme harus diberantas sampai ke akar akarnya. Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa bahwa terorisme bukan jihad oleh karena itu haram dilakukan bahkan teroris dianggap melakukan kerusakan fasiq, dalam al Quran dinyatakan bahwa orang yang melakukan perusakan di bumi harus dihukum dengan keras dan berat.* Oleh karena itu, upaya-upaya menanggulangi terorisme harus dilakukan dengan 2 cara mensinergikan antara pencegahan dan penindakan. Kedepan kami lebih mengutamakan pencegahan melalui peta radikalisme untuk menghilangkan atau menekan paham-paham radikal dan intoleran. Dan melalui de radikalisasi untuk mengembalikan mereka yang sudah terpapar untuk itu di dalam melakukan tindakan kami juga lebih akan pendekatan yang humanis manusiawi dengan tidak harus melanggar HAM untuk itu dalam menanggulangi terorisme masih akan datang kami akan mengajak ormas-ormas organisasi masyarakat khususnya keagamaan. (12) (*Debat Pertama*)

Data (12) tersebut menunjukkan terjadinya pelanggaran maksim kuantitas, hal tersebut tampak dari jawaban MA saat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh moderator. MA dalam debat tersebut memberikan informasi lebih dari yang dibutuhkan oleh mitra tuturnya, terlihat pada tuturan "*Terorisme adalah merupakan akan kejahatan oleh karena itu terorisme harus diberantas sampai ke akar akarnya. Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa bahwa terorisme bukan jihad oleh karena itu haram dilakukan bahkan teroris dianggap melakukan kerusakan fasiq, dalam al Quran dinyatakan bahwa orang yang melakukan perusakan di bumi harus dihukum dengan keras dan berat*". Kalimat tersebut tidak perlu dikatakan karena MA tidak langsung kepada apa yang ingin disampaikan melainkan memberikan penjelasan mengenai apa itu terorisme, serta penguatan ini juga memiliki alasan untuk memperkuat jawaban yang diberikan untuk memperoleh pembenaran dan pendengar atau peserta debat. Seharusnya MA cukup menjawab "*Oleh karena itu, upaya-upaya menanggulangi terorisme harus dilakukan dengan 2 cara mensinergikan antara pencegahan dan penindakan. Kedepan kami lebih mengutamakan pencegahan melalui peta radikalisme untuk menghilangkan atau menekan paham-paham radikal dan intoleran. Dan melalui de radikalisasi untuk mengembalikan mereka yang sudah terpapar untuk itu di dalam melakukan tindakan kami juga lebih akan pendekatan yang humanis manusiawi dengan tidak harus melanggar HAM untuk itu dalam menanggulangi terorisme masih akan datang kami akan mengajak ormas-ormas organisasi masyarakat khususnya keagamaan*". Karena pertanyaan berkaitan dengan bagaimana strategi anda agar pemberantasan terorisme bisa benar-benar di jalankan, tanpa ada persepsi dari masyarakat tentang terjadinya pelanggaran HAM harap jawab dapat merujuk pada kasus-kasus yang konkrit agar dapat secara jelas menggambarkan permasalahan yang dihadapi.

## 2) Pelanggaran Maksim Kualitas

Maksim kualitas ini menetapkan seorang peserta tutur diharapkan dapat menyampaikan sesuatu yang nyata dan sesuai fakta sebenarnya dalam bertutur.

Konteks : JW sedang memberikan tanggapan balik atastanggapan awal dari PS. Konteks pertuturan berkaitan tentang ada kepala daerah, gubernur-gubernur yang mendukung paslon 01 itu, menyatakan dukungan tidak apa-apa. Tapi ada kepala desa Jawa Timur menyatakan dukungan kepada kami, sekarang ditahan pak, ditangkep.

Tanggapan : Ingin bertanya bahwa bapak kan sudah memerintah selama 4 tahun lebih, yang kita temukan ada perasaan di masyarakat, bahwa kadang-kadang aparat itu berat sebelah. Sebagai contoh kalau ada kepala daerah, gubernur-gubernur yang mendukung paslon 01 itu, menyatakan dukungan tidak apa-apa. Tapi ada kepala desa Jawa Timur menyatakan dukungan kepada kami, sekarang ditahan

pak, ditangkep. Jadi saya kira, ini juga suatu perlakuan tidak adil ya, juga menurut saya pelanggaran ham karena menyatakan pendapat itu, dijamin oleh undang-undang dasar pak. Jadi sebetulnya, siapa pun boleh menyatakan pendapat dukungan siapapun. Saya kira ini yang kami mohon Bapak perhitungkan, mungkin juga ada anak buah Bapak yang mungkin berlebihan.

Jawaban JW : Karena kita ini adalah negara hukum, ada prosedur hukum, ada mekanisme b bnnbhukum yang bisa kita lakukan. Kalau ada bukti, sampaikan aja keparat hukum. *Jangan kita ini, sering grusak-grusuk menyampaikan sesuatu, misalnya apa jurkamnya Pak Prabowo misalnya ini, katanya dianiaya mukanya babak belur, kemudian konferensi pers bersama-sama, akhirnya apa yang terjadi ternyata operasi plastik, kalau ada.* Lho ini negara hukum, kalo ada bukti bukti, silakan lewat mekanisme hukum. Laporkan dengan bukti-bukti yang ada, gampang sekali kok hukum ini, kenapa harus menuduh nuduh seperti itu. (4) *(Debat Pertama)*

Data (4) tersebut menunjukkan terjadinya pelanggaran maksim kualitas, tanggapan dari JW tersebut mengandung informasi yang mengatakan sesuatu yang bukti kebenarannya kurang meyakinkan. Saat JW menyebutkan "*Jangan kita ini, sering grusak-grusuk menyampaikan sesuatu, misalnya apa jurkamnya Pak Prabowo misalnya ini, katanya dianiaya mukanya babak belur, kemudian konferensi pers bersama-sama, akhirnya apa yang terjadi ternyata operasi plastik, kalau ada*". Beliau tidak dengan pasti menyebutkan siapa jurkamnya PS tersebut, tetapi masih menggunakan kata misalnya, kalau ada. Hal tersebut memberikan kesan bahwa maksim kualitas yang digunakan JW masih belum bisa ia pastikan dengan kebenarannya, bahkan ia masih meragukan kebenarannya. Pada tuturan tersebut, seharusnya PS cukup mengatakan "*Karena kita ini adalah negara hukum, ada prosedur hukum, ada mekanisme hukum yang bisa kita lakukan. Kalau ada bukti, sampaikan aja keparat hukum. Lho ini negara hukum, kalo ada bukti bukti, silakan lewat mekanisme hukum. Laporkan dengan bukti-bukti yang ada, ampang sekali kok hukum ini, kenapa harus menuduh nuduh seperti itu*".

Konteks :PS sedang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh JW. Konteks pertanyaan berkaitan partai dan tanda tangan ketua umum.

Pertanyaan : Kita tahu korupsi adalah kejahatan yang luar biasa. Bahkan Pak Prabowo pernah mengatakan bahwa korupsi di Indonesia sudah tak di jumpai, meskipun ini saya engga setuju, tapi menurut ICW. Ini menurut ICW. Partai yang Bapak pimpin termasuk yang paling banyak mencalonkan mantan koruptor.Mantan napi korupsi, yang saya tahu caleg itu yang tanda tangan ada ketua umumnya. Berarti Pak Prabowo yang tanda tangan. Bagaimana Bapak menjelaskan mengenai ini?

Jawaban PS : *Dan begini Pak ada juga kadang-kadang ya, tuduhan tuduhan korupsi, yang korupsi itu ya menerima THR seluruh DPRD-nya. Semuanya lintas partai Pak.* Kalau kita sekarang dikejaksaa boleh kita bandingkan ya. Berapa orang yang sekarang sudah menunggu masuk KPK, ataupun sudah didalam penjara kita bisa cek. Saya kira janganlah kita apa saling menuduh. Soal partai kita masing-masing ya. Saya jamin partai Gerindra akan melawan korupsi sampai ke akar-akarnya. Kalau ada anggota Gerindra korupsi. Saya yang akan masukin ke penjara sendiri. (22) *(Debat Pertama)*

Data (22) tersebut menunjukkan terjadinya pelanggaran maksim kualitas, jawaban dari PS tersebut mengandung informasi yang mengatakan sesuatu yang bukti kebenarannya kurang meyakinkan. Saat PS menyebutkan "*Dan begini Pak ada juga kadang-kadang ya, tuduhan tuduhan korupsi, yang korupsi itu ya menerima THR seluruh DPRD-nya. Semuanya lintas partai Pak*", adapun argumen PS justru memberikan kesan bahwa maksim kualitas yang digunakan oleh PS masih belum bisa ia pastikan dengan benar kebenarannya. Pada tuturan tersebut, seharusnya PS menjelaskan apa yang ia sampaikan agar tidak melanggar maksim kualitas.

### 3) Pelanggaran Maksim Relevansi

Maksim relevansi menetapkan bahwa setiap peserta pembicaraan harus memberikan kontribusi yang relevan dengan masalah yang dibicarakan.

Konteks :JW sedang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh moderator. Konteks pertanyaan berkaitan tentang jabatan publik seringkali dibutuhkan biaya yang sangat tinggi, sehingga setelah menduduki jabatan perilaku korupsi kerap tidak terhindarkan.

Pertanyaan : Baik, saya hanya bacakan sekali mohon diperhatikan, untuk menduduki jabatan publik seringkali dibutuhkan biaya yang sangat tinggi, sehingga setelah menduduki jabatan perilaku korupsi kerap tidak terhindarkan. Apa strategi Anda untuk mengatasi politik berbiaya tinggi ini. Waktunya 2 menit di mulai saat anda berbicara”.

Jawaban JW : Prinsipnya recruitment itu harus berbasis kepada kompetensi, bukan finansial dan bukan nepotisme oleh sebab itu untuk pejabat-pejabat birokrasi recruitment harus dilakukan transparan sederhana dengan standar-standar yang jelas dan untuk jabatan-jabatan politik perlu sebuah penyedia dan sistem di dalam sistem kepartaian kita. Sehingga pemilu menjadi murah, pejabat-pejabat tidak terbebani oleh biaya-biaya pemilu. Sehingga kita harapkan, kita bisa memangkas politik uang, bisa memangkas suap, bisa memangkas korupsi dan kita bisa mendapatkan pejabat-pejabat publik yang memiliki integritas, yang memiliki kapasitas yang baik dan kita harapkan dengan recruitment-recruitment ini jabatan-jabatan baik itu Bupati, baik itu Walikota, baik itu Gubernur dan seterusnya kita akan dapatkan putra-putri terbaik karena memang recruitment-nya berjalan dengan transparan, akuntabel, dan bisa semua orang melihat dan sekarang sudah kita lakukan. *Contoh rekrutmen ASN kita, PNS kita bila pasar terbuka. Semuanya bisa cek, hasilnya juga bisa cek. Anak saya tidak bisa diterima di situ karena memang tidak lulus.* (10) (Debat Pertama)

Data (10) tersebut menunjukkan adanya pelanggaran maksim relevansi, maksim ini menginginkan kontribusi mitra tutur yang relevan dengan topik pembicaraan. JW memberikan informasi yang tidak relevan. Hal tersebut tampak pada tuturan “*Contoh rekrutmen ASN kita, PNS kita bila pasar terbuka. Semuanya bisa cek, hasilnya juga bisa cek. Anak saya tidak bisa diterima di situ karena memang tidak lulus*”. Dalam percakapan tersebut JW memberikan tambahan jawaban yang mengarah pada ketidakrelevanan. Hal tersebut bermaksud untuk memperkuat apa yang ia argumentasikan sebelumnya.

Konteks :PS sedang memberikan tanggapan balik atas jawaban MA. Konteks pertanyaan berkaitan tentang Deradikalisasi.

Tanggapan :Deradikalisasi itu dari mereka yang sudah terpapar mengembalikan ke jalan yang lurus ya ilal Haq menjadi Radikal lalu itu kenapa HAM keagamaan yang menyimpang maka yang harus kita Doktrin kan bagaimana meluruskan paham keagamaannya yang menyimpang itu yang ini Khilaf itu tetapi kalau itu disebabkan oleh faktor- faktor ekonomi sosial maka pendekatannya adalah melalui pemberian lapangan kerja dan juga santunan yang bisa mengembalikan mereka kepada jalan yang lurus saya kira ini yang harus kita kaji betul kenapa dia menjadi radikal

Jawaban PS : Ya tadi sudah kita singgung sebab musabab terorisme dan untuk itu indonesia negara kita harus kuat, *kita harus kuat dan padi kita harus swasembada pangan tidak boleh bergantung bangsa lain. Energi, air, lembaga kuat dan angkatan perang kita harus kuat, pulih kita harus kuat intelijen kita harus kuat kita harus bisa mendeteksi sebelum terjadi terorisme ya jangan menunggu ini perlu investasi ini perlu saya merasa bahwa ya ini bukan salah siapa-siapa mungkin kelengahan pemerintah. Tetapi saya akan meningkatkan investasi di bidang polisi intelijen dan angkatan bersenjata angkatan perang kita harus kita perkuat supaya kita bisa tahan kita bisa mendahului.* (15) (Debat Pertama)

Data (15) tersebut menunjukkan adanya pelanggaran maksim relevansi, maksim ini menginginkan kontribusi mitra tutur yang relevan dengan topik pembicaraan. PS memberikan informasi yang tidak relevan. Hal tersebut tampak pada tuturan “*kita harus kuat dan padi kita harus swasembada pangan tidak boleh bergantung bangsa lain. Energi, air, lembaga kuat dan angkatan perang kita harus kuat*”. Dalam percakapan tersebut PS memberikan tambahan jawaban yang mengarah pada ketidakrelevanan. Hal tersebut bermaksud untuk memperkuat apa yang ia argumentasikan sebelumnya.

4) Pelanggaran Maksim Pelaksanaan/cara

Maksim Pelaksanaan/cara menetapkan bahwa setiap peserta pembicaraan berbicara secara langsung, tidak kabur, tidak taksa (ambigu), dan tidak berlebih-lebihan.

Konteks : PS sedang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh moderator. Konteks pertanyaan berkaitan dengan langkah-langkah anda untuk mewujudkan birokrasi yang bebas dari korupsi.

Pertanyaan : Baik, Masih terseg-el. Mohon disimak saya hanya bacakan satu kali. Birokrasi merupakan ujung tombak negara untuk memenuhi hak-hak warga dan membenahan birokrasi merupakan salah satu upaya untuk memberantas korupsi. Bagaimana langkah-langkah anda untuk mewujudkan birokrasi yang bebas dari korupsi. Waktunya dua menit.

Jawaban PS : Berkali-kali saya utarakan di ruang publik, akar masalahnya adalah bahwa penghasilan para pegawai negeri para birokrat-birokrat itu kurang, tidak realistis, kalau saya memimpin negara ini pemerintahan, saya akan perbaiki kualitas hidup semua birokrat dengan realistis kemudian bertanya uangnya dari mana. Saya akan tingkatkan tax ratio yang sekarang berada di 10 % bahkan lebih rendah, kita kembalikan ke minimal 16 % tax ratio berarti kita akan dapat mungkin minimal 60 mil tiap dollar lebih. Dengan demikian saya akan perbaiki gaji-gaji semua pejabat birokrat dan semua pegawai negeri saya kira dengan kita tingkatkan gajinya dengan signifikan, perbaiki kualitas hidup, jamin kebutuhan kebutuhan dia. *Kalau dia masuk korupsi yang kita harus tindak sekeras kerasnya ya kalau perlu kita contoh tindakan tindakan drastis negara-negara lain kita taro di mana mungkin suruh tambang pasir di pulau yang terpencil terus-menerus mungkin.* Jadi kita perbaiki penghasilannya. Itu yang kita perlukan. Tidak masuk akal pejabat begitu penting penghasilannya sedikit tetapi sesudah itu kita awasi dengan ketat dengan segala senjata instrumen perangkat yang kita miliki inspektorat pengawas-pengawas tadi saya sebut kejaksaaan polisi KPK, kami akan perkuat KPK kami akan bikin KPK jika di daerah-daerah di provinsi-provinsi kami akan tambah anggaran KPK, KPK harus menjadi penegak antikorupsi di Republik Indonesia ini. (11) (*Debat Pertama*)

Data (11) terlihat adanya pelanggaran maksim pelaksanaan atau cara. Pelanggaran maksim cara dapat dilihat dari cara berbicara tidak langsung, kabur, taksa, berlebih-lebihan dan tidak runtut. Pada debat yang dianalisis hal ini terjadi pada saat PS memberikan tanggapan pada tuturan “*Kalau dia masuk korupsi yang kita harus tindak sekeras kerasnya ya kalau perlu kita contoh tindakan tindakan drastis negara-negara lain kita taro di mana mungkin suruh tambang pasir di pulau yang terpencil terus-menerus mungkin*”. Kata “*kita taro di mana mungkin suruh tambang pasir di pulau yang terpencil*” memiliki kadar kejelasan yang rendah. Seharusnya PS dapat menjelaskan maksud tuturan tersebut agar maknanya tidak kabur.

Konteks : SU sedang memberikan pertanyaan kepada paslon 01. Konteks pertanyaan berkaitan dengan hukum yang masih tumpang tindih.

Moderator : Baik kita langsung saja masuk para paslon kita masuki bagian kedua. Masih pertanyaan dengan tema hukum dan hak asasi manusia atau HAM dan kali kesempatan kami berikan kepada paslon nomor 02 untuk bertanya dan waktunya adalah lah satu menit dimulai pada saat anda mulai bicara silahkan

Jawaban SU : Ya seperti kita ketahui banyak hukum yang masih tumpang tindih dan salah 1 dari pertanyaan yang sering ditanyakan kepada saya di masyarakat. Bahwa

bagaimana lagi Bapak sudah 4 tahun bekerja untuk meyakinkan masyarakat bahwa tumpang tindih hukum dan lahirnya benturan-benturan kepentingan baru seperti penunjukan-penunjukan aparat hukum yang berafiliasi terhadap partai politik itu ditanyakan oleh masyarakat. Bagaimana investasi bisa meningkat kalau ada kepastian hukum yang terus dipertanyakan. UKM sulit untuk berkembang, banyak sekali UKM yang menanyakan kepastian hukum, nah kami ingin menanyakan kepada Bapak. *Bagaimana untuk memastikan dan ini terjadi di seandainya Bapak mendapatkan amanah dari Allah subhaana Wata ala untuk 5 tahun ke depan sementara bapak sudah 4 tahun 4 tahun menunjukkan ketidakberhasilan untuk kepastian hukum dan benturan kepentingan hadir di mana terima kasih.* (18) (Debat Pertama)

Pada data (18) terlihat adanya pelanggaran maksim pelaksanaan atau cara. Pelanggaran maksim cara dapat dilihat dari cara berbicara tidak langsung, kabur, taksa, berlebih-lebihan dan tidak runtut. Pada debat yang dianalisis hal ini terjadi pada saat SU bertanya mengenai *"Bagaimana untuk memastikan dan ini terjadi di seandainya Bapak mendapatkan amanah dari Allah subhaana Wata ala untuk 5 tahun ke depan sementara bapak sudah 4 tahun 4 tahun menunjukkan ketidakberhasilan untuk kepastian hukum dan benturan kepentingan hadir di mana terima kasih"*. SU tidak langsung kepada apa yang ingin disampaikan melainkan berbelit-belit dengan membahas mengenai pertanyaan yang ditanyakan masyarakat kepada SU pada tuturan *"Ya seperti kita ketahui banyak hukum yang masih tumpang tindih dan salah 1 dari pertanyaan yang sering ditanyakan kepada saya di masyarakat. Bahwa bagaimana lagi Bapak sudah 4 tahun bekerja untuk meyakinkan masyarakat bahwa tumpang tindih hukum dan lahirnya benturan-benturan kepentingan baru seperti penunjukan-penunjukan aparat hukum yang berafiliasi terhadap partai politik itu ditanyakan oleh masyarakat"*. Seharusnya SU dapat bertanya secara teratur agar tidak melanggar maksim pelaksanaan atau cara.

### Simpulan

Berdasarkan deskripsi analisis data yang telah disajikan pada bab pengolahan data. Dari empat jenis maksim prinsip kerja sama yang dikemukakan oleh Rahardi (2005: 45-57), dapat disimpulkan bahwa dalam Debat Pemilihan Umum Calon Presiden 2019 terdapat keempat maksim pelanggaran prinsip kerja sama dalam keseluruhan debat pertama sampai dengan debat kelima. Keempat jenis maksim pelanggaran prinsip kerja sama itu adalah: 1) Pelanggaran Maksim Kuantitas dalam Debat Pemilihan Umum Calon Presiden 2019 yang dilanggar berjumlah 14 tuturan, 2) Pelanggaran Maksim Kualitas dalam Debat Pemilihan Umum Calon Presiden 2019 yang dilanggar berjumlah 25 tuturan, 3) Pelanggaran Maksim Relevansi dalam Debat Pemilihan Umum Calon Presiden 2019 yang dilanggar berjumlah 26 tuturan, 4) Pelanggaran Maksim Pelaksanaan atau cara dalam Debat Pemilihan Umum Calon Presiden 2019 yang dilanggar berjumlah 19 tuturan.

### Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Tindakan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asnawi, A. (2014). Reformasi Pendidikan dan Pembelajaran Bahasa Sebagai Pengukuhan Karakter Bangsa. *Internasional Seminar Antarbangsa*, 536-545.
- Zulfadhli, M., Asnawi, & Hardani, M. (2017). Peran Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Perdagangan di Era MEA. *The 1st Education and Language International Conference*, 508-515. <http://lppm-unissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/ELIC/article/view/1267>
- Chaer, Abdul. 1994. *Linguistik Umum*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Rahardi, R. Kunjana. 2005. *Pragmatik Kesantunan Imperatif Bahasa Indonesia*. Ja Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sukardi. 2019. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*. (Editor, Ed.). Jakarta: Bumi Aksara.

- Hamidy, U. 2003. *Metodologi Penelitian Disiplin Ilmu-ilmu Sosial dan Budaya*. Tangerang Utara Pekanbaru: Bilik Kreatif Press.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Meleong, j. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Bandung
- Nadar, F.X.2009. *Pragmatik dan Penelitian Nilai Pragmatik*. Yogyakarta: Graha Ilmu .
- Wijayana, Putu I Dewa. 1996. *Dasar-dasar pragmatik*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Tarigan, Henry Guntur. 2009. *Pengajaran Pragmatik*. Bandung: Penerbit Angkasa.